

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan salah satu peran untuk mengatasi kejahatan. Secara rasional telah memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka mengatasi kejahatan dari berbagai sarana sebagai tanggapan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik kejahatan pidana maupun non pidana, yang bisa diintegrasikan untuk mengatasi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang sudah sesuai keadaan yang akan sewaktu waktu berubah dan yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukumnya, ketertiban dan perlindungan hukum pada masa modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksanakan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil . Pengertian penegakan hukum pun dapat dilihat dari:

##### **a. Dari Subjeknya**

Secara luas, semua proses penegakan hukum selalu melibatkan semua subjek hukumnya. Dari siapa saja yang tengah menjalankan secara aturan normativenya ataupun sesuatu yang mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Secara sempit, artinya sebagai upaya para aparatur

penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tengah berjalan sebagaimana mestinya.

b. Secara Objeknya

Secara luas, penegakkan hukum telah terpenuhi apabila telah mencangkupi nilai-nilai keadilan yang didalamnya mengandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang telah ada didalam masyarakat. Secara sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan aturan yang formal dan tertulis.

Dalam pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menurut agar semua nilai yang ada dibidang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua ,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta ,1997.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan fungsi norma hukum dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki timbal balik bagi masyarakat, menurut Soerjono Soekanto pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan ,menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Secara sempit, penegakan hukum padat dilihat dari segi subjeknya yang merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya hukum ini tentunya dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum tertentu. Dan apabila dilihat dari segi objektifnya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Secara kesimpulan maka penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5

nilai atau kaidah-kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya sebagai tugas dari semua penegak hukum yang sudah terkenal secara konvensional, akan tetapi sudah menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintah yang bertanggungjawab.<sup>3</sup>

## B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang memiliki terjemahan *strafbaarfeit*, istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika Maupun Undang-Undang Pornografi yang secara khusus mengatur Tindak Pidana Pornografi.<sup>4</sup> “Feit” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>5</sup> Menurut Vos, Tindak Pidana tindak pidana adalah salah perbuatan yang diancam oleh peraturan

---

<sup>3</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm. 49.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 181.

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>6</sup>

Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup> Tindak Pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>8</sup> Kemudian Moeljatno mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>6</sup> Tri Andrisman. Hukum Pidana. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007. hlm.81.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm.86.

2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan/tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan didalam nya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan nestapa atau hukuman berupa pidana, dimana penjatuhan pidana kepada pelaku adalah demi terbentuknya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu

---

<sup>9</sup> Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 69.

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 47.

tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Kemudian adapun unsur-unsur pada tindak pidana yang menjadi acuan dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Leden Marpaung mengatakan unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

1. Unsur Subjektif
  - a. Sengaja (dolus)
  - b. Keadaan (culpa)
2. Unsur Objektif
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Akibat (result) perbuatan manusia
  - c. Keadaan-keadaan



d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>11</sup>

### C. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Istilah perbuatan main hakim sendiri memiliki terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrechting*” yaitu suatu perbuatan yang menghakimi sendiri tanpa mengindahkan hukum tanpa adanya sepengetahuan pemerintah ataupun tanpa alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan melanggar hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>12</sup>

Main hakim sendiri merupakan suatu tindakan pidana yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena telah melakukan suatu kejahatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan menghakimi orang lain dengan mengeyampingkan hukum yang berlaku. masyarakat melakukan tindakan kekerasan serta penganiyaan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana tertangkap di tempat ramai dan tidak segera dilaporkan atau dibawa ke pihak yang berwenang. Perbuatan main hakim sendiri dapat berupa membakar pelaku tindak pidana hidup-hidup, memukul, mengeroyok bahkan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 22.

<sup>12</sup> Andi Hamzah. Kamus Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 167.

sampai menyebabkan pada kematian. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.<sup>13</sup>

Perbuatan main hakim sendiri terjadi karena akibat luapan emosi masyarakat yang tidak terkontrol. Masyarakat cenderung bersikap emosional ketika menangkap basah seseorang yang melakukan tindak pidana. Seharusnya masyarakat yang menemukan atau mendapati pelaku tindak pidana, harus mengamankannya dan segera memberitahu aparat setempat. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban publik dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Faktor utama yang menjadi penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri diantaranya :

1. Masyarakat tidak lagi mempercayai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Hanya ikut-ikutan. Ketika melihat massa yang secara anarkis dan membabi buta menghajar pelaku tindak pidana mereka tertarik untuk ikut-ikutan.
3. Adanya luapan emosi masyarakat kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. 2003. hlm. 23.

#### **D. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri**

Pada peraturan perundang-undangan belum lah diatur secara khusus terkait perbuatan main hakim sendiri. Tetapi pada KUHP bukan berarti tidak dapat diterapkan bila terjadi perbuatan main hakim sendiri. Seseorang yang menjadi korban main hakim sendiri dapat melapor pada pihak berwenang dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Yang bersalah diancam : Ke-1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka Ke-2, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ; Ke-3, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi Pasal ini.

Penjelasan pasal 170 KUHP disebutkan bahwa kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti contohnya perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau

membuang-buang barang sehingga berserakan. hal ini dapat diancam sebagai perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

#### **E. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik**

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang menentukan bahwa:

1. Penyidik adalah :
  - a. Pejabat Polisi Republik Indonesia
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

1. Pejabat Kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Kepolisian;

2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/Golongan IIB atau yang disamakan dengan itu.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai

kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah :

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada si korban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat; dan
6. identitas pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

Penyidik yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah Penyidik Kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ Polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1977. hlm.11.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 21

<sup>16</sup> H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta. Restu Agung. 2009. hlm. 9.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan



kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
5. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.

Kemudian, kegiatan penyidikan terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

- 1) kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
  - a. penyelidikan;
  - b. dimulainya penyidikan;
  - c. upaya paksa;
  - d. pemeriksaan;
  - e. penetapan tersangka;
  - f. pemberkasan;
  - g. penyerahan berkas perkara

- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  - i. penghentian penyidikan.
- 2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
- a. pemeriksaan;
  - b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
  - c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
  - d. menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- 3) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- 4) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat.

Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.